
**EKSISTENSI PARTAI POLITIK ISLAM DALAM MENGHADAPI PEMILU 2019
(STUDI KASUS PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN
TANGERANG)**

Oleh
Tolkah
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati, Tangerang
Email: dr.tolkah@gmail.com

Abstrak

Negara Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan yang berlandaskan Undang-Undang serta pancasila sebagai ideologi bangsa, secara tatanan negara Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem republik demokrasi. Pemilu 2019 merupakan pertarungan politik bagi seluruh partai yang berlandaskan agama maupun nasionalisme, penelitian ini melihat bagaimana eksistensi partai politik islam dalam menghadapi pemilu 2019, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta analisis triangulasi data, hasil penelitian menjelaskan bahwa demokrasi di negara Indonesia tercipta atas berdirinya beberapa partai politik yang saling memberikan gagasannya terhadap pembentukan bangsa, begitupun dengan lahirnya partai-partai islam yang sejak jaman reformasi telah banyak memberikan beragam aspirasinya terhadap sistem demokrasi Indonesia, semenjak Indonesia meninggalkan era orde baru, perkembangan partai-partai islam ini semakin bersinergi dengan politik tanah air hal ini di sebabkan oleh keterbukaan pemerintah terhadap upayanya untuk membentuk sebuah sistem demokrasi yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia, maka peranan partai islam sangat di butuhkan dalam merumuskan berbagai gagasan kenegaraan republik Indonesia.

Kata Kunci: Partai Islam, Demokrasi & Pemilu 2019.

PENDAHULUAN

Keberadaan sebuah negara demokratis pastinya membutuhkan hadirnya partai politik dan sebuah agenda pemilihan umum (pemilu), periode tersebut terjadi ketika adanya pergantian kekuasaan di dalam tubuh pemerintahan, begitupun yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu negara yang menerapkan sistem republik demokrasi, negara kita sangat menghargai keberadaan partai politik sebagai alat untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan merepresentasikan kepentingan berbagai kelompok tersebut dalam ruang lingkup organisasi partai politik, menurut Sastrawati (2015) bahwa partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk memengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam sebuah pemilihan umum.

Keberadaan partai politik dalam suatu negara merupakan satu elemen yang paling penting serta sangat berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi yang sehat dan terorganisir secara substantif, karena peran partai politik ini di pandang sebagai perwakilan aspirasi masyarakat luas, guna untuk membentuk suatu sistem pemerintahan yang ideal dan di harapkan mampu memberikan pengaruh yang sangat krusial terhadap perkembangan dan kesejahteraan suatu bangsa, atau bisa di katakan fungsi partai politik ini sebagai penghubung yang strategis di antara masyarakat dan pemerintahnya (Dienaputra, 2009; Natalia, 2015). Dan untuk menjamin keberadaan suatu partai politik di dalam suatu negara, maka pemerintah secara sah telah mengatur mengenai mekanisme pembentukan partai politik tersebut kedalam suatu Undang-Undang negara, adapun pengertian lain mengenai partai politik menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, bahwa partai politik



adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Di Indonesia sendiri keberadaan partai-partai politik ini muncul ketika era reformasi tepatna pada tahun 1998 dan sejak saat itu pemerintah mulai membentuk suatu rumusan Undang-Undang tepatnya pada tahun 1999, untuk memberikan ruang lingkup yang lebih pada peran partai politik tersebut, agar sejalan dengan tujuan dan pemikiran pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, adanya rumusan Undang-Undang politik tersebut untuk memastikan kinerja dan karakteristik partai politik agar memiliki ideologi dan paham yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Negara sehingga keberadaan partai politik ini dapat di akomodir secara jelas, tidak berpusat pada kepentingan dan kekuasaan pribadi ataupun menjadi predator bagi sebuah negara demokrasi, dalam temuan terbaru melihat kegagalan sebuah partai politik di sebabkan pada permasalahan internal terutama dalam hal pendanaan partai (Yusuf, 2014; Syafia, 2015; Zulifan, 2016).

Salah satu wujud dan tugas masyarakat dalam membentuk sebuah sistem politik yang jujur adalah dengan melibatkan hak suaranya pada kegiatan pemilihan umum(pemilu) yang selalu di adakan oleh pemerintah Indonesia selama empat tahun sekali, melalui agenda pemilu tersebut, di harapkan masyarakat dapat memberikan kebijakannya terhadap arah dan tujuan sistem pemerintahan negara yang berdaulat serta mampu meningkatkan kualitas masyarakatnya, pemilu sendiri memiliki fungsi utama untuk pembentukan kepemimpinan sebuah negara, di lain sisi pemilu juga di harapkan mampu menghasilkan sebuah sistem demokrasi yang benar-benar dapat mewujudkan berbagai aspirasi rakyatnya, sehingga keberadaan pemilu dapat menjadi

acuan terbentuknya negara demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan bangsa dan negara, Oleh karena itu, dalam demokrasi ditetapkan bahwa hukum yang paling tinggi adalah kehendak rakyat (Asroni et al, 2013; Wimra, 2015; Ridoi, 2016).

Dinamika keberadaan sebuah partai dan sistem politik pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang masing-masing memiliki makna yang sangat berbeda, jika merujuk pada kamus besar bahasa Indonesia Partai sendiri memiliki arti sebagai satu kesatuan organisasi sosial, sementara politik sendiri merupakan sebuah upaya seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dalam suatu sistem pemerintahan, jika makna dari kedua bahasa tersebut di satukan maka akan membentuk suatu pengertian, partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan di dalam sebuah negara. Pentingnya keberadaan partai politik dalam sebuah negara demokrasi, menimbulkan sebuah asumsi bahwa tidak ada demokrasi tanpa hadirnya partai politik, hal ini di dasari oleh fakta bahwa partai politik merupakan aspek terpenting dalam sebuah rangkaian sistem negara demokrasi, akan tetapi tanpa adanya partai politik yang kuat maka tidak akan tercipta sebuah sistem demokrasi yang kuat pula (Rosyadi, 2008; Sirajuddin, 2016).

Semenjak runtuhnya rezim orde baru tepatnya pada tahun 1998, dimensi dan pergerakan partai-partai di Indonesia mulai banyak mengalami perubahan dan peningkataan yang sangat signifikan, tidak terkecuali dengan lahirnya beberapa partai-partai yang bernuansa islami, sekaligus merupakan sebuah babak baru dalam kehidupan dunia politik di tanah air, terutama di era reformasi dengan memunculkan beberapa partai besar yang berasal dari organisasi-organisasi islam Indonesia, sebenarnya lahirnya partai-partai islam di tanah air ini tidak bisa lepas dari kemunculan Partai Persatuan Pembangunan, sebagai penanda awal kebangkitan umat islam dalam mengikuti sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia,

secara resmi Partai Persatuan Pembangunan ini lahir pada tanggal 5 Januari tahun 1973, dengan mempunyai dua tujuan yang sangat penting dalam membantu perkembangan sistem pemerintahan di tanah air, kedua tujuan tersebut di antaranya adalah, mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang di maksud dalam Undang-Undang 1945, kemudian tujuan yang berikutnya adalah mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam, dan di sisi lain Partai Persatuan Pembangunan merupakan satu satunya partai yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik umat muslim sejak tahun 1977 sampai tahun 1997, di karenakan pemerintah saat itu sangat membatasi pendirian partai politik dan hanya membagi dua aliran saja, yang pertama partai dengan beraliran agamis yang di wakili oleh Partai Persatuan Pembangunan dan yang kedua partai nasionalis yang terwakilkan oleh partai demokrasi Indonesia.

Secara resmi Partai Persatuan Pembangunan ini memang memiliki peran yang sangat penting dalam terbentuknya partai-partai muslim di Indonesia, dan menjadi tonggak awal kebangkitan umat muslim dalam menyuarakan berbagai aspirasi politiknya kepada pemerintah, karena dengan tujuan awal Partai Persatuan Pembangunan ini ingin menjaga keutuhan dan kerukunan umat Islam yang ada di Indonesia, sebagai pelopor kekuatan bangsa dan memperkuat persatuan dan kesatuan negara republik Indonesia, Islam dan politik merupakan sebuah kesatuan yang saling terikat, dimana Islam membutuhkan politik (negara) untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan negara membutuhkan nilai-nilai dalam mengawal pemerintahannya, terutama pada aspek moralitasnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Peneliti juga ingin mengkaji sebuah fenomena yang membahas tentang Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2017, penelitian

kualitatif tertuju pada sebuah penelitian yang sangat terperinci dan detail dimana hasil dari penelitian tersebut di kaji secara mendalam kemudian di tafsirkan secara jelas. Terdapat dua sumber data yang di gunakan pada penelitian ini, dimana data tersebut mencakup data primer dan juga data sekunder selanjutnya fakta-fakta temuan tersebut di uraikan dalam bentuk pembahasan yang sangat mudah sehingga peneliti dapat menemukan sebuah pemahaman yang kompleks dan terstruktur secara terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Partai Politik di Indonesia

Perkembangan politik di tanah air tidak dapat terpisahkan dari awal terbentuknya kemerdekaan bangsa Indonesia yang merupakan babak baru dimana sistem pemerintahan, hukum, sosial, dan keagamaan harus berjalan secara seimbang sesuai dengan cita-cita bangsa, peran partai politik di Indonesia memang sangat memberikan sebuah kontribusi yang sangat penting dalam terwujudnya sistem demokrasi yang berkualitas serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada kehidupan masyarakat luas, menginjak lembaran baru setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, kontribusi partai politik seharusnya dapat di tingkatkan dalam segi kapasitasnya, kualitasnya, serta kinerjanya, sehingga aspirasi-aspirasi rakyat dapat di aplikasikan dengan tepat melalui peningkatan partai politik dan sistem demokrasi yang sejahtera (Malik, 2016).

Secara jelas partai politik memang di maknai sebagai salah satu transportasi penyampaian kebijakan yang sah dan di akui oleh pemerintah, pada arti lain menyebutkan bahwa partai politik di gunakan oleh sekelompok orang untuk menggapai sebuah kekuasaan di dalam suatu pemerintahan negara, baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif, secara umum partai politik di Indonesia di bagi ke dalam dua golongan, yang pertama partai politik Islam, dan yang kedua partai politik nasional.

Sementara itu, masyarakat juga sebenarnya mempunyai kewenangan dan hak-



hak nya dalam menyuarkan berbagai aspirasi kepada wakil-wakil rakyatnya semua nya dapat terealisasi melalui sebuah pemilihan umum, selain itu pemilu juga dapat di maknai sebagai mekanisme berdemokrasi dalam sebuah negara, karena partisipasi dalam berpolitik merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga nya dan telah di jamin melalui pancasila serta Undang-Undang negara, partisipasi tersebut dapat di lakukan melalui sebuah partai politik yang memang di fungsikan sebagai wakil rakyat dalam menyuarkan beragam aspirasinya demi sebuah pemerintahan yang bersih, terbuka dan mementingkan kepentingan masyarakat luas, setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berhak dan bebas meyakinkan politiknya dengan benar dan secara bijaksana (Joebagio, 2016).

Akan tetapi memasuki era baru dimana banyak sekali orang yang mendirikan beberapa partai politik di Indonesia, banyak sekali menimbulkan masalah yang serius terhadap sistem pemerintahan dan demokrasi tanah air, hal itu salah satu nya di sebabkan oleh lemahnya lembaga partai politik dalam memelihara situasi yang terdapat pada tubuh partai politik tersebut, kebanyakan partai politik di masa sekarang, hanya membangun citra politiknya ketika akan menghadapi sebuah pemilihan umum saja, selanjutnya partai politik tersebut belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai sehingga banyak sekali perseteruan yang terjadi di dalam organisasi partai tersebut hingga menimbulkan gejolak di antara pengurus dan kader partai politik tersebut, tentunya hal ini harus segera di atasi dengan membentuk sebuah tim pengelola partai yang terorganisasi serta memiliki sebuah visi dan misi yang jelas, serta mempunyai orientasi yang jelas demi meningkatkan kualitas sistem demokrasi bangsa yang kuat.

Sebenarnya jika kita memahami lebih jauh mengenai tugas dan fungsi partai politik agar sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern tugas tersebut tentunya harus sejalan dengan aspirasi rakyat yang sesungguhnya, sehingga semua fungsi dapat

berjalan secara sistematis dan menjadi bahan dasar pembuatan keputusan-keputusan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakatnya, menurut Nurhayati & Hasan (2015) di dalam sebuah negara modern partai politik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu, pertama sebagai sarana komunikasi politik, dimana partai politik di fungsikan untuk menyalurkan beragam pendapat dan aspirasi masyarakat, kemudian di tampung dalam sebuah rapat kerja, setelah menemui hasil yang maksimal semua keputusan-keputusan tersebut di gabungkan dan di olah dalam bentuk kerja nyata yang sangat teratur proses ini dinamakan (*Intereste Articulation*). Kemudian yang kedua berfungsi sebagai sarana sosialisasi politik, dalam hal ini partai politik membentuk sebuah orientasi terhadap fenomena politik di dalam sebuah lingkungan masyarakat, biasanya proses sosialisasi tersebut berjalan secara bertahap dan di selenggarakan melalui sebuah metode ceramah atau berupa kuliah umum kepada masyarakat sekitar.

Kemudian fungsi terakhir partai politik di dalam sebuah lingkungan masyarakat modern adalah, sebagai sarana rekrutment politik, tugas ini sebenarnya berfungsi untuk mencari dan mengadakan sebuah sosialisasi mendasar kepada lingkungan masyarakat untuk lebih memahami seperti apa tugas partai politik dalam menampung berbagai aspirasi dan masukan dari masyarakat, setelah semua sosialisasi di lakukan tahap selanjutnya adalah mengajak orang-orang untuk ikut aktif dalam kegiatan berpolitik di tanah air sekaligus menjadi bagian anggota partai, sehingga turut memperluas jaringan partisipasi politik di Indonesia, proses tersebut dapat di katakan dengan (*Political Recruitment*), partai politik merupakan sebuah perkumpulan sekelompok orang yang terorganisasi dengan baik yang mana di dalamnya terdapat beberapa prosedur hukum, dan memiliki tujuan yang sama yakni berusaha untuk menguasai sebuah kekuasaan dalam tubuh pemerintah dan merebut simpati masyarakat luas sebagai modal dukungan moral atas dasar sebuah persaingan dengan golongan

lain yang memiliki pandangan berbeda (Artis, 2012).

Secara garis besar perkembangan partai politik di Indonesia memang banyak di pengaruhi oleh beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu seperti ketika lengsernya presiden soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, dimana pada era tersebut bisa di katakan terciptanya sebuah lembaran baru dalam merumuskan sistem demokrasi di Indonesia, termasuk permasalahan politik yang memang sudah sejak lama selalu mengalami pasang surut dalam menentukan arah pemerintahan bangsa Indonesia, Pengangkatan Prof. B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan tonggak awal periode reformasi, beliau melakukan reformasi di segala bidang, memulihkan kehidupan di bidang sosial-ekonomi, dan meningkatkan demokrasi (Triono, 2015).

Perkembangan Partai Politik Islam di Indonesia

Setelah runtuh nya era orde baru dan di lanjutkan dengan di angkatnya presiden Prof B.J. Habibie, dinamika kehidupan partai politik mulai kembali bergeliat dan menunjukkan eksistensinya pada sistem demokrasi tanah air, begitupun dalam pembentukan partai-partai islam, dimana dinamika organisasi-organisasi islam mulai menunjukkan perkembangnya dengan melahirkan beberapa partai islam sebagai tonggak awal perpolitikan islam akan segera di mulai di Indonesia, memasuki era modern ini kebangkitan partai-partai islam pada beberapa edisi keikutsertaannya dalam pemilu memang belum menunjukkan sebuah prestasi yang sangat tinggi, akan tetapi dengan berdirinya beberapa partai islam tersebut menunjukkan bagaimana hubungan politik negara dengan agama islam merupakan dua aspek yang memang memiliki ikatan yang sangat baik, partai politik Islam di Indonesia dalam sejarahnya telah mewarnai sejak berdirinya negara ini. Determinasi nilai agama dalam dinamika politik merupakan suatu keniscayaan yang memang semestinya terjadi. Agama sejauh ini telah mapan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan

warga sebuah pentas politik (Agung & Putra, 2016).

Persentuhan antara politik dan islam memang sudah sejak lama terjadi dalam sejarah berdirinya negara Indonesia, dimana pada saat itu salah satu partai besar islam sekaligus pelopor berdirinya partai-partai islam di Indonesia, yakni Partai Persatuan Pembangunan menetapkan asas pancasila dan menghilangkan asas islam dalam acara muktamarnya yang pertama tepat pada tahun 1984. Hadirnya Partai Persatuan Pembangunan di tengah-tengah politik demokrasi Indonesia turut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari beberapa basis pendukungnya, dalam keikutsertaannya pada pemilu tahun 1995, dukungan yang mengalir kepada Partai Persatuan Pembangunan sebesar 43,5%, sebagian besar perolehan suara tersebut berasal dari kalangan Masyumi dan Nahdatul Ulama sebagai dua sumber organisasi islam terbesar di tanah air, Yang menarik, hampir sepertiga dari jumlah total partai yang berdiri dan lolos sebagai peserta pemilu tahun 1999 itu, terdiri dari partai-partai Islam. Partai Islam berjumlah 42 dari total partai yang mendaftar Pemilu. Yang dikategorikan sebagai partai Islam adalah partai yang beraskan Islam seperti PBB (Partai Bulan Bintang), PPP (Partai Persatuan Pembangunan), PK (Partai Keadilan), Partai Masyumi, PUI (Partai Umat Islam), dan sebagainya.

Sebagai salah satu partai islam terbesar yang ada di Indonesia, Partai Persatuan Pembangunan berhasil mempertahankan elektabilitasnya di kalangan masyarakat luas, bahkan sampai saat ini, partai berlambang ka'bah ini juga di nilai sebagai salah satu partai yang setia ketika rezim orde baru sedang berkuasa, sebagai partai oposisi, partai persatuan pembangunan menekankan sifat moderatnya, dan tetap teguh pada sikapnya yakni mendukung reformasi melalui pendekatan prinsip-prinsip islamnya, karena prinsip yang di pegang oleh Partai Persatuan Pembangunan adalah, politik merupakan salah satu bidang amal kebaikan terhadap kepentingan masyarakat luas, maka dari itu menjalankan sebuah amanah melalui politik demokratis



merupakan prinsip-prinsip dasar yang di pakai oleh Partai Persatuan Pembangunan dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang adil dan tetap berpegangan pada aqidah keislaman yang benar.

Fenomena berdirinya beberapa partai islam pada pasca periode orde baru di dasarkan pada beberapa faktor, yang pertama faktor teologis, dalam pandangan ini, agama merupakan sebuah integrasi yang tidak dapat di pisahkan dengan politik dalam hal ini agama islam merupakan aspek terbesar dalam kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia, maka separuh kekuatan politik negara bersumber dari pemahaman-pemahaman ajaran agama islam, syariat islam sangat di perlukan dalam penerapan hukum pidana maupun hukum perdata, selain itu politik islam juga merupakan sebuah perwujudan dari pandangan masyarakat Indonesia yang memang mayoritas penduduknya memeluk agama islam, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai hampir 200 juta orang maka sudah sepantasnya aspirasi politik demokrasi negara Indonesia harus melibatkan nilai-nilai dan syariat agama islam, Sedangkan dalam hal ini partai politik Islam dilihat sebagai organisasi yang memiliki organ-organ di dalamnya yang bekerja satu sama lain. Islam politik di Indonesia sebenarnya sudah lama muncul, jauh sebelum Masyumi didirikan. Hal ini disebabkan Islam telah menjadi bagian dan pelopor bagi masyarakat pribumi dalam memperjuangkan dan menegakkan identitas negara (Herdiansah, 2017).

Dinamika islam dalam dunia politik Indonesia dapat di petakan ke dalam beberapa model, yang pertama sentuhan islam dan politik sudah di mulai sejak bangsa Indonesia belum mendapatkan kemerdekaannya, hal ini semakin menunjukkan bagaimana agama islam merupakan agama yang mampu membangkitkan semangat perjuangan nasional dalam meraih kejayaannya, maka dari itu adanya partai politik islam pada pusaran pemerintahan nasional merupakan wadah penyalur bagi aspirasi dan keinginan rakyat Indonesia, secara sosiologis umat islam yang

berada di Indonesia merupakan basis pendukung terkuat atas berdirinya beberapa partai besar islam yang masih beridiri hingga saat ini, meskipun secara Undang-Undang negara Indonesia merupakan sebuah negara republik demokrasi yang dimana di dalamnya terdapat beberapa kebudayaan, ras, suku dan beberapa agama yang berbeda, namun jika menilik sejarah kebelakang umat islam memang sangat berperan besar dalam terciptanya kemerdekaan bangsa Indonesia.

Faktor reformasi merupakan salah satu faktor terkuat dalam pembentukan beberapa partai besar islam, dimana pada masa ini pemerintah memberikan kebebasan pada setiap golongan atau kelompok untuk dapat menyuarakan berbagai aspirasinya dalam upaya pembentukan sistem demokrasi yang ideal bagi masyarakat Indonesia, maka kesempatan ini tidak di sia-siakan begitu saja oleh elit politik partai islam untuk membentuk suatu partai dengan pemahaman-pemahaman ajaran islam sebagai faktor pembentuknya, hal lain yang menyebabkan partai islam sangat berpengaruh terhadap sistem pemerintahan Indonesia adalah, agama dan negara merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan begitu saja, karena agama islam merupakan sebuah agama yang kompleks dan universal, tidak hanya mengatur mengenai ritual-ritual ibadah saja, lebih dari itu mencakup berbagai sistem politik dan pemerintahan tata negara, meskipun mayoritas bangsa Indonesia ini merupakan pemeluk agama islam terbesar di dunia akan tetapi fakta tersebut tidak berkolerasi positif terhadap elektabilitas partai-partai islam, terutama ketika era globalisasi mulai berpengaruh terhadap sistem pemerintahan indonesia melalui perkembangan ekonomi, budaya, dan politik seperti kesejahteraan partai-partai berbasis islam masih akan sulit untuk dapat menyaingi partai-partai nasional Indonesia (Yasin, 2011).

Konflik Dalam Partai Islam

Menurunnya performa dan elektabilitas partai-partai islam dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, salah satunya mungkin di akibatkan oleh menurunnya tingkat

kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi para pengurus partai-partai besar islam dalam menangani konflik internal di dalam organisasi partai tersebut, banyak sekali contoh kasus partai islam yang berseteru dengan anggota ataupun kadernya sendiri, yang pertama kasus Partai Kebangkitan Bangsa, dimana terdapat dualisme kepemimpinan di dalam tubuh partai PKB tersebut, kubu yang berseteru adalah pihak dari Gusdur melawan kubu Muhaimin Iskandar, dimana pada prosesnya, setelah perselisihan ini berakhir, lahirlah partai PKBI.

Sama seperti kasus yang pertama, namun kali ini melibatkan partai Persatuan Pembangunan dimana konflik ini terjadi pada tahun 1982, ketika era kepemimpinan Jaelani Naro di anggap tidak adil terhadap beberapa anggota kadernya. Siapa sangka partai pelopor kebangkitan umat islam tersebut harus menghadapi sebuah kenyataan pahit dan menimbulkan perpecahan internal di kalangan para pengurusnya, kasus ini bermula ketika sikap Jaelani yang menempatkan beberapa kader Nahdatul Ulama dalam posisi yang kurang strategis, al hasil karena tidak terima dengan keputusan jaelani Naro tersebut, pihak kader Nahdatul Ulama tersebut menyatakan diri untuk keluar dari struktur kepengurusan partai Persatuan Pembangunan tersebut. konflik internal tersebut melibatkan unsur MI yang merupakan unsur pendukung paling loyal dalam tubuh partai Persatuan Pembangunan, dengan unsur Nahdatul Ulama.

Kemudian partai yang ketiga adalah partai PAN dimana kasus ini bermula ketika pihak Pan tidak mengakomodir kubu muda yakni kudu muhammadiyah dan kemudian melahirkan sebuah partai baru yang bernama PKBI. Pasa saat itu juga kubu muda muhammadiyah akhirnya menghasilkan sebuah organisasi islam baru bernama PBR, Kemudian ada partai keadilan sejahtera, dan masih banyak lagi sederet kasus yang melibatkan partai besar di Indonesia, sebenarnya perpecahan internal dalam tubuh partai-partai islam selama ini sangat mencoreng nama baik partai sekaligus ketua serta para anggotanya, maka untuk menghindari segala bentuk tindakan penyelewengan yang di lakukan oleh beberapa

partai islam di Indonesia seharusnya, dalam mengelola sebuah konflik tersebut di butuhkan sosok pemimpin yang dapat memberikan angin segar terhadap perkembangan partai ketika tau konflik di dalam tubuh partai tersebut sedang memanas dan menyebabkan sebuah perselisihan diantara para kader partai tersebut. Konflik internal itu juga banyak disebabkan oleh perebutan pundi-pundi kekuasaan di kalangan Partai. Konflik internal yang sering terjadi itu, bisa menjadi bahan kampanye negatif bagi partai lain dan pasti akan berdampak signifikan pada perolehan suara partai Islam ke depan ketika mengikuti sebuah agenda pemilu, menurut Mandan (2009) persoalan lemahnya kaderisasi dalam Partai Islam di akibatkan tidak adanya sosok pemimpin yang kharismatik hal tersebut adalah problem mendasar yang juga menyebabkan partai-partai Islam mengalami senjakala politiknya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil analisis di atas, dapat diketahui bahwa, Eksistensi Partai Politik Islam Dalam Menghadapi Pemilu Tahun 2019, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia Indonesia mempunyai banyak sekali partai-partai politik yang telah terbentuk sejak era perjuangan kemerdekaan, tidak terkecuali dengan hadirnya beberapa partai dengan benuansa islami, sejak era reformasi di mulai di Indonesia, pembentukan partai-partai islam memang dinilai sangat signifikan, hal ini di dasari oleh sikap pemerintah Indonesia yang memberikan kebebasan kepada berbagai organisasi ataupun kelompok untuk dapat menyuarakan aspirasinya dalam upaya membentuk sebuah pemerintahan yang adil serta dapat memajukan kepentingan masyarakat luas, Komisi Pemilihan Umum mencatat puluhan partai politik berazaskan islam bermunculan dan ikut bagian dalam beberapa edisi pemilihan umum yang di adakan oleh pemerintah Indonesia, di mulai dengan berdirinya Partai Persatuan Pembangunan sebagai pelopor berdirinya partai-partai islam lainnya dan menjadi salah satu partai yang



sangat berpengaruh terhadap iklim politik di Indonesia, selain itu hadirnya partai politik islam ini merupakan sebuah wujud kepedulian beberapa elit partai islam yang menginginkan sebuah dimensi politik sebagai wadah masyarakat dalam menyampaikan beberapa aspirasinya pada pemerintah Indonesia, sebagai negara islam terbesar di dunia sudah seharusnya keberadaan partai-partai islam ini mendapatkan tempat yang sangat luas di kalangan masyarakat agar negara ini selalu menerapkan sebuah aturan dan hukum yang amanah dan tidak lepas dari syariat-syariat islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agung, S., & Putra, R. S. (2016). studi dimensi systemness dan reification dalam pelebagaan partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tasikmalaya pasca reformasi. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 2(1), 47-59.
- [2] Artis, A. (2012). Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Sosial Budaya*, 9(1), 59-80.
- [3] Asroni, A., Yusup, M., & Sofia, A. (2013). Dakwah dan politik: Menakar kontribusi organisasi Islam sayap partai politik bagi masyarakat muslim Yogyakarta. *Jurnal Dakwah*, 14(1), 27-50.
- [4] Dienaputra, R. D. (2009). Transformasi Visual Lambang-Lambang Partai Politik Islam (1955–2004). *ITB J. Vis. Art Des*, 3(1), 89-102.
- [5] Herdiansah, A. G. (2017). Pragmatisme Partai Islam Di Indonesia: Pendekatan Tindakan Sosial. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(2), 152-167.
- [6] Joebagio, H. (2016). Membaca politik Islam pasca reformasi. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 6(01), 1-8.
- [7] Malik, D. K. (2016). Partai Politik Islam dan Pemilihan Umum Studi Peningkatan Dukungan Elektoral PKB dan PPP Pada Pemilu Legislatif 2014 DPR RI di Dapil DKI Jakarta. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(1), 46-68.
- [8] Mandan, A. M. (2009). Krisis ideologi: catatan tentang ideologi politik kaum santri, studi kasus penerapan ideologi Islam PPP. Pustaka Indonesia Satu.
- [9] Natalia, A. (2015). Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 45-66.
- [10] Nurhayati, C., & Hasan, H. (2015). PENERIMAAN PARTAI POLITIK ISLAM DI PTAIN. *Dialog*, 38(1), 79-92.
- [11] Ridoi, M. (2016). *Kekuatan figur dalam partai politik (studi terhadap Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa)* (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah).
- [12] Rosyadi, I. (2008). GAGASAN DAN PRAKTIK POLITIK ISLAM ERA 1996-1990-AN DALAM PERSPEKTIF ORDE BARU.
- [13] Sastrawati, N. (2015). Simbolisme Dalam Pencitraan Partai Politik. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 4(1), 168-177.
- [14] Sirajuddin, S. (2016). EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN DI INDONESIA. *LEX ADMINISTRATUM*, 4(1).
- [15] Syafiâ, M. (2015). Pandangan Greg Barton Tentang Islam Liberal dan Eksistensi Politik Islam di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 5(2), 388-432.
- [16] Triono, T. (2015). Faktor-faktor Penyebab Menurunnya Perolehan Suara Parpol Islam Pada Pemilu 2014. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 11(1), 89-102.
- [17] Wimra, Z. (2015). BOOK REVIEW Meneropong Agenda Penjinakkan Politik Islam di Indonesia. *Turast: Jurnal*



-
- Penelitian dan Pengabdian*, 3(2), 227-241.
- [18] Yasin, A. (2011). Turas Al Siyasiy Partai Politik Islam di Indonesia. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 1(01), 19-42.
- [19] Yusuf, H. (2014). EKSISTENSI DAN KARAKTERISTIK POLITIK ISLAM SUATU INSPIRASI BAGI FORMULASI POLITIK KONTEMPORER. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 103-120.
- [20] Zulifan, M. (2016). Politik Islam di Indonesia: Ideologi, Transformasi dan Prospek dalam Proses Politik Terkini. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 1(2), 171-



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN